

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- , (2013). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Ahmad Fanani. (2020). *Pola penyebaran virus korupsi dan pencegahannya*. Jawa Tengah:Desa Pustaka Indonesia.
- Ahmad Rifai. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Amrizal Sutan Kayo. (2013). *Audit forensik penggunaan dan kompetensi auditor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta:Rineka Cipta.
- , (2012). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Cholid Narkubo, & Abu Ahmad. (2007). *Metode penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Darwan Prints. (2002). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2016). *Buku panduan akademik*. Lhokseumawe:Unimal Press.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2019). *Buku panduan penulisan tugas akhir*. Lhokseumawe:Unimal Press.
- H. Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Makawimbang, H. F. (2015). *Memahami menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang*. Yogyakarta:Thafa Media.

- Mulyana W. Kusumah. (2019). *Tegaknya supremasi hukum*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Korupsi, good governance dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Jakarta:Penerbit BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- R, Wiyono. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Edisi ke-2). Jakarta:Sinar Grafika.
- R, Wiyono. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Saidi, M. D. (2008). *Hukum keuangan negara*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Soedikno Mertokusumo. (1999). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta:UI Press.
- Surachmin. (2011). *Strategi korupsi dan teknik korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi*. Jakarta:Perpustakaan Nasional RI.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Jakarta:Salemba Empat.

Peraturang Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya

Anisa Isma Fairuz. (2023). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwashliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)*. Skripsi. Universitas Medan Area.

- Adnan. (2024). *Analisis hasil pengawasan inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Majene*. Skripsi. Universitas Sulawesi Barat.
- Aso Alfian Nur. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana bansos penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Christine Juliana Sinaga. (2017). Kajian terhadap pidana penjara sebagai subsidair pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 193. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>
- Debyra Restu Mauludi. (2023). *Bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif kriminologi*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Fadli. (2022). Kebijakan kontroversial dana BOS tahun 2021. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(4), 457–458.
- Indra Dwi Putra Suastawan, I. D. P., et al. (2017). Pengaruh budaya organisasi, proactive fraud audit, dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS (Studi empiris pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng). *e-Journal Akuntansi Program SI*, 7(1), 2.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Buletin teknis penyusunan neraca awal pemerintah daerah*.
- Maradu Soleh Tua Pasaribu. (2019). *Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Moh. Zainudin. (2019). Penyelewengan dana BOS dapat terjadi karena kurangnya transparansi pihak sekolah terhadap publik. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>
- Muhammad Shoim. (2009). *Laporan Penelitian Individual: Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Rahima Br Purba. (2025). Pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien dalam mencegah penyalahgunaan. *Journal of Science and Social Research*, 7(2), 2. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3138>
- Raldin Alif. (2023). Pengaruh kemiskinan dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.31092/jaa.v3i2.2563>

Tiara Tizky. (2021). *Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19*. Skripsi. Universitas Malikussaleh.

Tinton Abadi. (2021). Pemidanaan bagi penganjur tindak pidana korupsi menurut Pasal 55 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(7), 16.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/34994/0>

Yoda Satria Agung. (2019). *Penegakan sanksi hukum administratif terhadap penggunaan amonia oleh industri yang mencemari udara di Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd